

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bab ini, penulis menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian data tersebut disajikan. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan teknik yang sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam Bab III, yakni teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung (*face to Face*) dengan sumber data (*respoden*). Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan penelitian melakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian yang umum dilakukan dalam penelitian diskriptif kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. Adapun data yang penulis paparkan disini adalah data yang diperoleh dari wawancara penulis kepada subjek penelitian yakni:

1. Nama : Dra.Risdayanti, M.Si
Jabatan : Ketua P2TP2A Provinsi Riau
2. Nama : Haryati, SE, S.Psi, ME, Sy.Ak
Jabatan : Psikolog di P2Tp2A
3. Nama : Desi Riawati, S.Sos
Jabatan : Konselor tetap di P2Tp2A
4. Nama : Iin Rafida, S.Psi
Jabatan : Konselor tetap di P2Tp2A

Berdasarkan data subjek peneliti di atas, penulis melakukan wawancara mendalam kepada satu orang ketua bidang P2Tp2A, satu orang psikolog dan dua orang konselor di P2Tp2A Provinsi Riau, untuk memperoleh penjelasan langsung tentang bagaimana pelaksanaan layanan advokasi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu anak korban kekerasan fisik di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di P2Tp2A Provinsi Riau, maka penulis melakukan wawancara dengan dua orang konselor, satu orang psikolog dan wawancara dengan ketua P2Tp2A sebagai *key informan* dalam penelitian ini. Jadi, subjek penelitian ini sebanyak empat orang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 7 maret 2019 kepada Kasi dan Kesubag di P2Tp2A selaku tenaga pelayanan dan pusat informasi yang akan menangani setiap kasus yang terlapor ke Unit Pelayanan Terpadu P2Tp2A Provinsi Riau, maka dari itu peneliti mendapatkan banyak informasi dari bentuk pelaporan kasus yang terjadi kepada pihak P2Tp2A. Kasi Kesubag mengatakan bahwa kurang lebih selama lima tahun berdirinya Unit Pelayanan Terpadu P2Tp2A Provinsi Riau, sangat banyak kasus yang masuk dan telah tertangani dengan baik. Begitupun dengan berbagai macam kasus kekerasan yang terjadi baik itu kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) kekerasan seksual dan kekerasan pada anak seperti, kekerasan fisik dan kekerasan psikis, yang telah di tangani menggunakan teknik unsur layanan konseling seperti layanan mediasi, konsultasi dan layanan advokasi. Dari tiga layanan ini yang sering digunakan untuk menangani kasus tindak kekerasan sering menggunakan teknik layanan mediasi dan layanan advokasi. Dan untuk menangani kasus kekerasan pada anak biasanya pihak P2Tp2A selalu menggunakan layanan advokasi yang merupakan cara yang tepat.

Menurut pendapat Prayitno Layanan advokasi yang merupakan suatu dampingan oleh konselor untuk menangani setiap kasus yang terlapor ke lembaga konseling yang sedang dalam penanganan lembaga konseling, namun kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui proses konseling sehingga harus diselesaikan bersama pengadilan dan konselor diwajibkan mendampingi klien selama proses konseling berlangsung dan melepaskan diri jika kasus telah selesai.³⁴

³⁴ Prayitno, *Seri panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung*[Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung],(program profesi Konselor Universitas Negeri Padang,2012), Hlm 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses pelaksanaan layanan advokasi, berperan dua pihak yang saling terkait yaitu konselor (pendamping) dengan klien. Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki kewenangan secara profesional untuk mendampingi klien dalam melaksanakan layanan advokasi, dalam proses ini konselor yang aktif mengembangkan proses konseling melalui oprasionalisasi layanan advokasi dengan berbagai tahap-tahap dan teknik-teknik pelaksanaan layanan.

Teknik wawancara yang digunakan ialah sebagai pusat informasi yang diperlukan untuk mendapatkan data yang valid. Jadi, peneliti menjadikan satu orang sebagai *key informan* penelitian ini yaitu ibu Dra.Risdayanti, M.Si selaku Ketua Perlindungan Anak dan Perempuan P2Tp2A Provinsi Riau. *Informan* Pendukung dalam penelitian ini ialah dua orang konselor dan satu orang psikolog di P2Tp2A Provinsi Riau. Adapun teknik wawancara digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan Advokasi dalam membantu anak korban kekerasan fisik di pusat pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2Tp2A Provinsi Riau.

Analisa peneliti mengenai pelaksanaan layanan Advokasi dalam membantu anak korban kekerasan fisik, dapat di paparkan bahwa setiap kasus akan di tangani menggunakan layanan advokasi yang bersama-sama dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Maka dari itu perlu adanya dampingan untuk klien yang akan mengikuti layanan advokasi selama layanan berlangsung. Bimbingan yang di berikan merupakan suatu bentuk bantuan yang bersifat mendampingi selama diperlukan, dan melepaskan diri sendiri bila ternyata orang yang telah dibantu bisa sehat jasmani maupun rohaninya. Kegiatan layanan advokasi ini dilaksanakan atas kerjasama dengan tim instansi terkait lainnya untuk membentuk pelaksanaan oprasionalisasi layanan secara bertahap hingga kasus tersebut dapat ditangani dengan baik.³⁵

Berikut ini adalah penyajian hasil wawancara yang telah dijawab dari pertanyaan yang diajukan peneliti berdasarkan teori dan tersaji dalam

³⁵ Hasil wawancara, Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak, di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Pada hari jum'at 8 maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoaman wawancara terhadap Ketua Unit Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, dengan ibu Dra.Risdayanti, M.Si dan dua orang konselor dan satu psikolog di P2Tp2A provinsi Riau dengan judul penelitian **Pelaksanaan Layanan Advokasi Dalam Membantu Anak Korban Kekerasan Fisik di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau.**

1. Pelaksanaan Layanan Advokasi Dalam Membantu Anak Korban Kekerasan Fisik di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

- a. Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan ini bersifat terbuka dan komprehensif. Pada tahap ini terlebih dahulu mengidentifikasi masalah klien secara lengkap beserta masalah dan kondisi awal dirinya, juga secara komprehensif memuat materi dasar dan pengembangannya dalam hubungan dengan pihak-pihak terkait. Rencana layanan ini juga membuka keyakinan dan kejelasan klien akan diselenggarakannya berbagai tahap-tahap layanan serta memeriksa kesehatan klien, baik itu kesehatan psikologis mau kesehatan psikis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dra.Risdayanti, M.Si sebagai ketua Unit Pelayanan Terpadu P2Tp2A Provinsi Riau. Mengatakan bahwa terlaksananya suatu layanan advokasi tidak lepas dari perencanaan yang baik. Begitupula dengan perencanaan dalam layanan advokasi yang merupakan penentuan dari tindakan untuk mencapai suatu hasil yang di inginkan. Dan agar tahap-tahap tersebut berjalan dengan lancar maka perlunya perkenalan agar hubungan yang akrab sehingga tercipta nyaman bagi klien, mengidentifikasi masalah klien dimana konselor maupun psikolog mampu membuat klien meluapkan masalah yang dialami, jadi ini suatu tahap memudahkan layanan untuk memecahkan permasalahan. Ketika klien

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat gangguan fisik dan psikologis maka tim dari kesehatan akan cepat menangani kesehatan setiap klien.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Haryati, SE, S.Psi, ME, Sy.Ak selaku Psikolog di (P2Tp2A) Provinsi Riau Mengatakan bahwa terlaksananya suatu layanan advokasi tidak lepas dari perencanaan yang baik. Begitupula dengan perencanaan dalam layanan advokasi yang merupakan penentuan dari tindakan untuk mencapai suatu hasil yang di inginkan. Dan agar tahap-tahap tersebut berjalan dengan lancar maka perlunya perkenalan agar hubungan yang akrab sehingga tercipta nyaman bagi klien, mengidentifikasi masalah klien dimana konselor maupun psikolog mampu membuat klien meluapkan masalah yang dialami, jadi ini suatu tahap memudahkan layanan untuk memecahkan permasalahan. Ketika klien terdapat gangguan fisik dan psikologis maka tim dari kesehatan akan cepat menangani kesehatan setiap klien.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konselor (P2Tp2A) Provinsi Riau ibu Desi Riawati, S.Sos mengenai tahap perencanaan pelaksanaan layanan advokasi. Mengatakan bahwa terlaksananya suatu layanan advokasi tidak lepas dari perencanaan yang baik. Begitupula dengan perencanaan dalam layanan advokasi yang merupakan penentuan dari tindakan untuk mencapai suatu hasil yang di inginkan. Dan agar tahap-tahap tersebut berjalan dengan lancar maka perlunya perkenalan agar hubungan yang akrab sehingga tercipta nyaman bagi klien, mengidentifikasi masalah klien dimana konselor maupun psikolog mampu membuat klien meluapkan masalah yang dialami, jadi ini suatu tahap memudahkan layanan untuk memecahkan permasalahan. Ketika klien terdapat gangguan fisik dan psikologis

³⁶ Hasil wawancara dengan ibu Dra.Risdayanti, M.Si, Pada Tanggal 11 Maret 2019

³⁷ Hasil wawancara dengan ibu Haryati, SE, S.Psi, ME, Sy.Ak, Pada Tanggal 11 Maret

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka tim dari kesehatan akan cepat menangani kesehatan setiap klien.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor P2Tp2A ibu Iin Rafida, S.Psi Mengatakan bahwa terlaksananya suatu layanan advokasi tidak lepas dari perencanaan yang baik. Begitupula dengan perencanaan dalam layanan advokasi yang merupakan penentuan dari tindakan untuk mencapai suatu hasil yang di inginkan. Dan agar tahap-tahap tersebut berjalan dengan lancar maka perlunya perkenalan agar hubungan yang akrab sehingga tercipta kenyamanan bagi klien, mengidentifikasi masalah klien dimana konselor maupun psikolog mampu membuat klien meluapkan masalah yang dialami, jadi ini suatu tahap memudahkan layanan untuk memecahkan permasalahan. Ketika klien terdapat gangguan fisik dan psikologis maka tim dari kesehatan akan cepat menangani kesehatan setiap klien. Harapan kami untuk semua pihak agar tidak berbuat tindak kekerasan pada perempuan dan anak karena akan membawa pengaruh buruk bagi mereka jika kekerasan terjadi pada ibunya maka berdampak juga pada anak.³⁹

Menurut analisa peneliti, dalam Pelaksanaan Layanan Advokasi telah terlaksana sesuai tahap perencanaan untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Dan sebelum layanan advokasi dilaksanakan sesuai berawal dari tahap perkenalan untuk membangun keakraban terhadap klien dan pihak terkait, dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi klien, memberikan perawatan terhadap kesehatan fisik dan psikologis klien. Menciptakan hubungan yang baik (rapport) antara konselor dan klien. Suatu percakapan sosial yang membutuhkan beberapa waktu bisa saja lama ataupun singkat, maka Dari itu akan terlihat ketertekanannya di dalam pribadi yang sedang dilalui klien di luar sana.

³⁸ Hasil wawancara dengan ibu Desi Riawati, S.Sos, Pada Tanggal 11 Maret 2019

³⁹ Hasil wawancara dengan ibu Iin Rafida, S.Psi, Pada Tanggal 11 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Prayitno, mengatakan Layanan Advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan berupa suatu dampingan bagi kasus yang terlapor ke lembaga konseling dan sedang dalam penanganan lembaga konseling. Namun kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui konseling dan perlunya advokasi yang dilaksanakan bersamaan dengan pihak kepolisian dan hakim. konselor mendampingi klien selama layanan advokasi berlangsung.⁴⁰

Jadi, berdasarkan teori yang peneliti gunakan dalam penyesuaian dengan fenomena yang terjadi maka telah menemukan jawabannya berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan yang telah peneliti lakukan.

b. Pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan

Pengorganisasian disesuaikan dengan keberhasilan layanan advokasi secara nyata yang diwujudkan dilapangan dan disesuaikan dengan seluruh unsur materi dan sarana dengan pihak terkait, waktu dan tempat, serta aspek terkait demi kelancaran proses pelaksanaan layanan. Dan pengaturan organisasi seperti itu setiap kali disesuaikan objektif pada tahap kemajuan layanan advokasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Dra.Risdayanti, M.Si yang mengatakan bahwa pengorganisasian unsur-unsur layanan konseling merupakan bentuk kegiatan yang mengatur prosedur kerja suatu kegiatan layanan advokasi. Dengan adanya pengorganisasian layanan dapat berjalan dengan tertib, dan efektif sehingga layanan advokasi berlangsung terarah. Tujuan dari pengorganisasian ialah untuk meningkatkan efektifitas suatu kegiatan dan dapat meningkatkan pemahaman tentang proses layanan advokasi serta membangun komunikasi antar klien dan tim advokasi, sehingga memiliki persepsi dan tujuan yang sama. Dengan adanya tahap ini psikolog maupun konselor dapat menetapkan sarana seperti fasilitas

⁴⁰ Prayitno, *Seri panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung [Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung]*, (Padang: Program pendidikan Profesi Konselor Universitas Negri Padang, 2012). Hlm 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan beserta penetapan waktu dan tempat pelaksanaan layanan advokasi.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan psikolog P2Tp2A Provinsi Riau ibu Haryati, SE, S.Psi, ME,Sy.Ak yang mengatakan bahwa pengorganisasian unsur dan sarana layanan konseling merupakan bentuk kegiatan yang mengatur prosedur kerja suatu proses pelaksanaan layanan advokasi. Dan dengan adanya pengorganisasian layanan maka akan memudahkan proses mendiagnosa klien sehingga layanan berjalan dengan efektif serta prosesnya berlangsung teratur sampai tahap akhir. Pengorganisasian disesuaikan dengan keberhasilan layanan advokasi secara nyata yang diwujudkan dilapangan yang disesuaikan dengan seluruh unsur materi dan sarana dengan pihak terkait, waktu dan tempat, serta aspek terkait demi kelancaran proses pelaksanaan layanan.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Konselor P2Tp2A Provinsi Riau ibu Desi Riawati, S.Sos yang mengatakan bahwa pengorganisasian unsur layanan advokasi merupakan bentuk kegiatan yang mengatur prosedur kerja pelaksanaan layanan. Seperti mempersentasikan materi layanan advokasi kepada klien. Dengan pengorganisasian layanan dapat memudahkan proses mendiagnosa klien sehingga layanan berlangsung efektif sampai tahap akhir. Pengorganisasian disesuaikan dengan keberhasilan layanan advokasi yang diwujudkan dilapangan berdasarkan bukti dari kasus terkait, memerlukan waktu dan tempat untuk kelancaran proses pelaksanaan layanan ini. Dan pihak P2Tp2A telah mempersiapkan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan layanan advokasi.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Iin Rafida, S.Psi sebagai konselor di (P2Tp2A) Provinsi Riau. Beliau mengatakan

⁴¹ Hasil wawancara dengan ibu Dra.Risdayanti, M.Si, Pada Tanggal 11 Maret 2019

⁴² Hasil wawancara dengan ibuk Haryati, SE, S.Psi, ME,Sy.Ak, pada tanggal 11 maret

⁴³ Hasil wawancara dengan ibuk ibu Desi Riawati, S.Sos, Pada tanggal 11 maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengorganisasian unsur dan sarana layanan advokasi yang merupakan kegiatan untuk mengatur cara kerja pelaksanaan layanan advokasi tersebut. Pengorganisasian layanan advokasi berguna untuk memudahkan dalam mencari permasalahan klien. Maka dari itu Sebelum layanan dilaksanakan terlebih dahulu mempersentasikan materi layanan kepada pihak terkait agar layanan berjalan efektif hingga tahap akhir. Pengorganisasian disesuaikan dengan keberhasilan layanan yang diwujudkan dilapangan. Memerlukan waktu dan tempat, serta fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan layanan advokasi ini.⁴⁴

Menurut analisa peneliti, dalam Pelaksanaan Layanan Advokasi di P2Tp2A Provinsi Riau telah mampu melaksanakan layanan advokasi ini dengan baik secara tahap-pertahap dengan mencapai hasil harapan dan keinginan. Dan sebelum layanan advokasi dilaksanakan maka adanya pengorganisasian unsur dan sarana layanan yang diperlukan dalam menangani setiap kasus. Pengorganisasian unsur dan sarana layanan merupakan kegiatan yang mengatur cara kerja suatu pelaksanaan layanan advokasi. Terlebih dahulu mempersentasikan materi Layanan pada kedua belah pihak. Pengorganisasian ini dapat memudahkan dalam mendiagnosa permasalahan klien agar layanan berlangsung efektif sampai tahap akhir. Pengorganisasian disesuaikan dengan keberhasilan layanan yang dilaksana dilapangan sesuai dengan unsur sarana layanan, waktu dan tempat beserta fasilitas yang diperlukan. Pada tahap ini layanan harus berlangsung lancar agar mudah menuju lanjut ketahap berikutnya.

Menurut Prayitno, Layanan Advokasi merupakan bantuan berupa suatu dampingan dari konselor terhadap klien dalam mengikuti layanan advokasi dengan tujuan sdapat mengembalikan hak-hak anak yang tercederai.⁴⁵

⁴⁴ Hasil wawancara dengan ibuk Iin Rafida, S.Psi, Pada tanggal 11 maret 2019

⁴⁵ Prayitno, *Seri panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung [Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung]*, (Padang: Program pendidikan Profesi Konselor Universitas Negri Padang, 2012). Hlm 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, berdasarkan teori yang digunakan peneliti dalam penyesuaian dengan phenomena dilapangan maka ditemukan jawabannya berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan yang telah dilakukan.

c. Pelaksanaan Layanan Advokasi

Rencana dan sarana awal yang telah disiapkan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kelancaran dan keberhasilan layanan yaitu penerimaan diri klien, memperdalam penyebab konflik dan membuat penstrukturan terhadap kedua belah pihak. Dan selama layanan berlangsung pengorganisasian dan pengaturan serta segala sesuatunya dapat dilakukan.

Layanan advokasi merupakan layanan dalam bimbingan dan konseling yang lebih kepada pembelaan terhadap hak klien yang tercederai oleh konselor untuk mendampingi klien ke pada proses tindak lanjut yang merupakan suatu bentuk bantuan yang bersifat mendampingi selama diperlukan, dan melepaskan diri jika permasalahan klien telah selesai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Dra.Risdayanti, M.Si sebagai ketua Unit Pelayanan Terpadu P2Tp2A Provinsi Riau. Mengatakan bahwa dalam melaksanakan layanan advokasi membutuhkan perencanaan yang tepat dan perorganisasian yang sejalan untuk memudahkan dalam melaksanakan layanan advokasi agar layanan dapat berjalan dengan baik. dalam pelaksanaan layanan ini membutuhkan keseriusan dalam melaksanakan layanan dengan propesional kerja yang perlu diutamakan supaya layanan advokasi terlaksana dengan baik. Pada tahap pertama layanan advokasi akan dilaksanakan, di sini konselor mendampingi klien selama proses layanan berlangsung dan memberikan pembelaan yang adil dan propesional utuk klien. Seterusnya mencari titik permasalahan klien, dengan bersama-sama merembukkan sebab kasus ini terjadi, cari informasi yang akurat. Setelah menemukan kepastian dari kasus maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di selenggarakan penstrukturan yang telah disepakati bersama-sama termasuk klien. Untuk melancarkan pelaksanaan layanan advokasi maka penstrukturan ini sangat penting.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan psikolog (P2Tp2A) Provinsi ibuk Haryati, SE, S.Psi, ME,Sy.Ak. yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan layanan advokasi membutuhkan perencanaan yang tepat dan perorganisasian yang sejalan untuk memudahkan dalam melaksanakan layanan advokasi agar layanan dapat berjalan dengan baik. dalam pelaksanaan layanan ini membutuhkan keseriusan dalam melaksanakan layanan dengan propesional kerja yang perlu diutamakan supaya layanan iadvokasi terlaksana dengan baik. Pada tahap pertama layanan advokasi akan dilaksanakan, di sini konselor mendampingi klien selama proses layanan berlangsung dan memberikan pembelaan yang adil dan propesional utuk klien. Seterusnya mencari titik permasalahan klien, dengan bersama-sama merembukkan sebab kasus ini terjadi, cari informasi yang akurat. Setelah mengetahui kasus yang sebenarnya maka di selenggarakan penstrukturan yang telah disepakati bersama-sama termasuk klien. Untuk melancarkan pelaksanaan layanan advokasi maka penstrukturan ini sangat penting dan bertujuan untuk memberikan solusi untuk kasus yang sedang di alami kedua belah pihak.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konselor (P2Tp2A) Provinsi Riau ibu Desi Riawati, S.Sos Mengatakan bahwa dalam melaksanakan layanan advokasi membutuhkan perencanaan yang tepat dan perorganisasian yang sejalan untuk memudahkan dalam melaksanakan layanan advokasi agar layanan dapat berjalan dengan baik. dalam pelaksanaan layanan ini membutuhkan keseriusan dalam melaksanakan layanan dengan propesional kerja yang perlu

⁴⁶ Hasil wawancara dengan ibu Dra.Risdayanti, M.Si, pada tanggal 11 maret 2019

⁴⁷ Hasil wawancara dengan ibu Haryati SE, S.Psi, ME. Sy Ak, Pada tanggal 11 maret

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diutamakan supaya layanan iadvokasi terlaksana dengan baik. Pada tahap pertama layanan advokasi akan dilaksanakan, di sini konselor mendampingi klien selama proses layanan berlangsung dan memberikan pembelaan yang adil dan profesional untuk klien. Seterusnya mencari titik permasalahan klien, dengan bersama-sama merembukkan sebab kasus ini terjadi, cari informasi yang akurat. Setelah menemukan kepastian dari kasus maka di selenggarakan penstrukturan yang telah disepakati bersama-sama termasuk klien. Untuk melancarkan pelaksanaan layanan advokasi maka penstrukturan ini sangat penting.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konselor (P2TP2A) Provinsi Riau ibu Iin Rafida, S.Psi berpendapat bahwa dalam melaksanakan layanan advokasi membutuhkan perencanaan yang tepat dan perorganisasian yang sejalan untuk memudahkan dalam melaksanakan layanan advokasi agar layanan dapat berjalan dengan baik. dalam pelaksanaan layanan ini membutuhkan keseriusan dalam melaksanakan layanan dengan profesional dalam bekerja yang perlu diutamakan agar layanan advokasi terlaksana dengan baik. Pada tahap pertama layanan advokasi akan dilaksanakan, di sini konselor mendampingi klien selama proses layanan berlangsung dan memberikan pembelaan yang adil dan profesional untuk klien. Seterusnya mencari titik permasalahan klien, dengan bersama-sama merembukkan sebab kasus ini terjadi, cari informasi yang akurat. Setelah menemukan kepastian dari kasus maka di selenggarakan penstrukturan yang telah disepakati bersama-sama termasuk klien. Untuk melancarkan pelaksanaan layanan advokasi maka penstrukturan ini sangat penting.⁴⁹

Menurut analisa peneliti, dalam Pelaksanaan Layanan Advokasi telah terlaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan dan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ibu Desi Riawati S.Sos, Pada tanggal 11 maret 2019

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan ibu Iin Rafida S.Psi, Pada tanggal 11 maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melaksanakan layanan advokasi membutuhkan perencanaan yang tepat dan perorganisasian yang sejalan untuk memudahkan dalam melaksanakan layanan advokasi agar layanan dapat berjalan dengan baik. dalam pelaksanaan layanan ini membutuhkan keseriusan dalam melaksanakan layanan dengan profesional dalam bekerja yang perlu diutamakan agar layanan advokasi terlaksana dengan baik. Pada tahap pertama layanan advokasi akan dilaksanakan, di sini konselor mendampingi klien selama proses layanan berlangsung dan memberikan pembelaan yang adil dan profesional untuk klien. Seterusnya mencari titik permasalahan klien, dengan bersama-sama merembukkan sebab kasus ini terjadi, cari informasi yang akurat. Setelah menemukan kepastian dari kasus maka di selenggarakan penstrukturan yang telah disepakati bersama-sama termasuk klien. Untuk melancarkan pelaksanaan layanan advokasi maka penstrukturan ini sangat penting. Dengan harapan agar tercapai keberhasilan yang diinginkan terhadap solusi yang baik bagi kedua belah pihak.

Menurut Prayitno, Layanan Advokasi merupakan bantuan berupa suatu dampingan dari konselor terhadap klien dalam mengikuti layanan advokasi dengan tujuan sapat mengembalikan hak-hak anak yang tercederai.⁵⁰

Jadi, berdasarkan teori yang digunakan peneliti dalam penyesuaian dengan phenomena lapangan maka ditemukan jawabannya berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan yang telah dilakukan.

d. Penilaian dan Analisis hasil evaluasi

Penilaian dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan. Dari penilaian ini dapat mengetahui seberapa jauh hak-hak klien yang ditangani melalui layanan advokasi dapat dikembalikan secara penuh

⁵⁰ Prayitno, *Seri panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung [Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung]*, (Padang: Program pendidikan Profesi Konselor Universitas Negeri Padang, 2012). Hlm 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada klien, Menafsirkan semua hasil evaluasi dari layanan dan mengubah tingkah laku yang melakukan penindasan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua P2Tp2A Provinsi Riau ibu Dra.Risdayanti, M.Si beliau mengatakan bahwa penilaian analisis hasil evaluasi merupakan penilaian dari seberapa besar keberhasilan yang dapat dicapai, dalam layanan advokasi ini sebagai dampingan akan memberikan pernyataan dan pembelaan terhadap klien. Dari penilaian dapat mengukur seberapa jauh hak-hak klien yang ditangani melalui layanan advokasi dapat dikembalikan kepada klien. Dan menafsirkan hasil merupakan keputusan yang harus diterima kedua pihak. Dan disampaikan kepada kedua pihak secara transparan. Setelah itu akan diberikan pembekalan dan nasehat kepada pihak perkara untuk tidak berbuat tindak kekerasan apapun terhadap anak.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan psikolog (P2Tp2A) Provinsi ibu Haryati, SE, S.Psi, ME,Sy.Ak. yang mengatakan bahwa penilaian analisis hasil evaluasi layanan advokasi merupakan penilaian pada seberapa jauh keberhasilan yang dapat dicapai, dalam layanan advokasi ini sebagai dampingan akan memberikan pernyataan dan pembelaan terhadap klien. Dari penilaian dapat mengukur seberapa jauh hak-hak klien yang ditangani melalui layanan advokasi dapat dikembalikan kepada klien. Dan menafsirkan hasil evaluasi sebagai keputusan yang harus diterima kedua pihak. Dan disampaikan kepada kedua pihak secara transparan. Setelah itu akan disampaikan pesan moral kepada pelaku dan klien agar menjadi pribadi yang lebih baik sehingga dapat kembali pada kehidupan yang damai.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konselor (P2Tp2A) Provinsi Riau ibu Desi Riawati, S.Sos Mengatakan bahwa penilaian analisis hasil evaluasi layanan advokasi merupakan

⁵¹ Hasil wawancara dengan ibu Dra. Ridayanti M.Si, pada tanggal 11 maret 2019

⁵² Hasil wawancara dengan ibu Haryati SE, S.Psi, ME, Sy.Ak, pada tanggal 11 maret

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penilaian pada seberapa jauh keberhasilan yang dapat dicapai, dan sebagai dampingan akan memberikan pernyataan dan pembelaan terhadap klien. Dari penilaian dapat mengukur seberapa jauh hak-hak kilen yang ditangani melalui layanan advokasi dapat dikembalikan kepada klien. Dan menafsirkan hasil evaluasi sebagai keputusan yang harus diterima kedua pihak. Dan disampaikan kepada kedua pihak secara transparan. Setelah itu akan menyampaikan arah kepada pelaku untuk mengubah tingkah laku keji tersebut agar kembali pada kehidupan yang layak bagi klien.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konselor (P2TP2A) Provinsi Riau ibu Iin Rafida, S.Psi berpendapat bahwa penilaian analisis hasil evaluasi layanan advokasi merupakan penilaian pada seberapa jauh keberhasilan yang dapat dicapai, dan sebagai dampingan akan memberikan pernyataan dan pembelaan terhadap klien. Dari penilaian dapat mengukur seberapa jauh hak-hak kilen yang ditangani melalui layanan advokasi dapat dikembalikan kepada klien. Dan menafsirkan hasil evaluasi sebagai keputusan yang harus diterima kedua pihak. Dan disampaikan kepada kedua pihak secara transparan. Setelah itu akan di sampaikan nasehat kepada pihak perkara untuk tidak berbuat tindak kekerasan apapun terhadap anak dan dapat kembali pada kehidupan yang damai.⁵⁴

Menurut analisa peneliti, dalam Pelaksanaan Layanan Advokasi membutuhkan perencanaan layanan, perorganisasian layanan dan pelaksanaan layanan yang sesuai agar dapat analisis hasil dengan jelas. Maka dari itu penilaian analisis hasil evaluasi layanan advokasi merupakan penilaian pada seberapa jauh keberhasilan yang dapat dicapai, dan sebagai dampingan akan memberikan pernyataan dan pembelaan terhadap klien. Dari penilaian dapat mengukur seberapa jauh hak-hak kilen yang ditangani melalui layanan advokasi dapat

⁵³ Hasil wawancara dengan ibu Desi Riawati S.Sos, pada tanggal 11 maret 2019

⁵⁴ Hasil wawancara dengan ibu Iin Rafida S.Psi, Pada tanggal 11 maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembalikan kepada klien. Dan menafsirkan hasil evaluasi sebagai keputusan yang harus diterima kedua pihak. Dan disampaikan kepada kedua pihak secara transparan. Setelah itu akan di sampaikan pesan moral kepada pelaku dan klien agar menjadi pribadi yang lebih baik sehingga dapat kembali pada kehidupan yang damai.

Menurut Prayitno, Layanan Advokasi merupakan bantuan berupa suatu dampingan dari konselor terhadap klien dalam mengikuti layanan advokasi dengan tujuan sdapat mengembalikan hak-hak anak yang tercederai.⁵⁵

Jadi, berdasarkan teori yang digunakan peneliti dalam penyesuaian dengan phenomena dilapangan maka ditemukan jawabannya berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan yang telah dilakukan.

e. Tindak lanjut dan laporan

Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan hasil penilaian secara progresif pada setiap tahap layanan. Demikian pula laporan dapat dibuat berupa laporan pertahap kegiatan atau laporan lengkap pada akhir keseluruhan layanan dan disesuaikan dengan keperluan klien.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua P2Tp2A Provinsi Riau ibu Dra.Risdayanti, M.Si beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan proses tindak lanjut kasus harus menyesuaikan dari hasil penilaian secara progresif. Dan memberikan nasehat kepada pihak pelaku untuk tidaklagi berbuat kesalahan yang sama dan saling memaafkan untuk kembali hidup damai dan sejahtera dalam sebuah keluarga, dan anak merupakan titipan allah swt yang patut untuk dilindungi, diberikan ilmu kasih sayang dari orang tuanya.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan psikolog (P2Tp2A) Provinsi ibuk Haryati, SE, S.Psi, ME,Sy.Ak. yang

⁵⁵ Prayitno, *Seri panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung [Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung]*,(Padang: Program pendidikan Profesi Konselor Universitas Negri Padang, 2012). Hlm 274

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ibu Dra. Risdayanti M.Si, pada tanggal 11 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa dalam melaksanakan proses tindak lanjut kasus harus menyesuaikan dari hasil penilaian secara progresif. Dan memberikan nasehat kepada pihak pelaku untuk tidak lagi berbuat kesalahan yang sama dan saling memaafkan untuk kembali hidup damai dan sejahtera dalam sebuah keluarga, dan anak merupakan titipan Allah SWT yang patut untuk dilindungi dan berikan kebebasan untuk menemukan bakatnya serta kasih sayang.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konselor (P2Tp2A) Provinsi Riau Ibu Desi Riawati, S.Sos mengatakan bahwa dalam melaksanakan proses tindak lanjut kasus harus menyesuaikan dari hasil penilaian secara progresif. Dan memberikan nasehat kepada pihak pelaku untuk tidak lagi berbuat kesalahan yang sama dan saling memaafkan untuk kembali hidup damai dan sejahtera dalam sebuah keluarga, dan anak merupakan titipan Allah SWT yang patut untuk dilindungi dan berikan di perlakukan sebagai anak yang dilindungi dengan kasih sayang.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konselor (P2TP2A) Provinsi Riau Ibu Iin Rafida, S.Psi berpendapat bahwa dalam melaksanakan proses tindak lanjut kasus harus menyesuaikan dari hasil penilaian secara progresif. Dan memberikan nasehat kepada pihak pelaku untuk tidak lagi berbuat kesalahan yang sama dan saling memaafkan untuk kembali hidup damai dan sejahtera dalam sebuah keluarga, dan anak merupakan titipan Allah SWT yang patut untuk dilindungi dan berikan di perlakukan sebagai anak yang dilindungi sesuai tuntunan kaedah.⁵⁹

Menurut analisa peneliti, dalam Pelaksanaan Layanan Advokasi membutuhkan perencanaan, perorganisasian dan pelaksanaan layanan yang terarah sesuai dengan tahap layanan advokasi hingga

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Haryati, SE, S.Psi, ME, Sy.Ak, Pada tanggal 11 Maret 2019

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Desi Riawati S.Sos, Pada Tanggal 11 Maret 2019

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Iin Rafida S.Sos, Pada tanggal 11 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir. Untuk melaksanakan proses tindak lanjut kasus harus menyesuaikan dari hasil penilaian secara progresif. Dan memberikan nasehat kepada pihak pelaku untuk tidak lagi berbuat kesalahan yang sama dan saling memaafkan untuk kembali hidup damai dan sejahtera dalam sebuah keluarga, dan anak merupakan titipan Allah SWT yang patut dilindungi dengan kasih sayang orang tua, agar anak dapat kembali pada kehidupan yang layak sesuai dengan usianya.

Menurut Prayitno, Layanan Advokasi merupakan bantuan berupa suatu dampingan untuk kasus yang terlapor ke lembaga berwajib dan sedang dalam penanganan lembaga tersebut. Dan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dengan proses konseling maka perlunya diadakan layanan advokasi untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Tujuan pelaksanaan layanan advokasi ini untuk membantu memperoleh kembali hak-hak klien yang tidak diperhatikan dan yang tidak sesuai tuntunan HAM, sehingga memperoleh kembali hak-hak klien yang hilang.⁶⁰

Jadi, berdasarkan teori yang peneliti gunakan dalam penyesuaian dengan fenomena yang terjadi maka telah menemukan jawabannya berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan yang telah peneliti lakukan.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, maka perlulah penulis membuat pembahasan dari penelitian yang telah dipaparkan di atas dengan judul Pelaksanaan Layanan Advokasi Dalam Membantu Anak Korban Kekerasan Fisik di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

Dalam menganalisa data penelitian dilakukan berdasarkan analisa kualitatif, sesuai dengan jenis data yang disajikan, kemudian dianalisa untuk

⁶⁰ Prayitno, *Seri panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung [Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung]*, (Padang: Program pendidikan Profesi Konselor Universitas Negeri Padang, 2012). Hlm 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan kesimpulan dari penjabaran setiap point pertanyaan wawancara dan menemukan gambaran dari setiap jawaban, berikut hasil analisis penulis:

1. Tahap Perencanaan

Setiap klien yang datang ke P2Tp2A pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Setiap klien yang melapor ke pihak Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Provinsi Riau yang mempunyai berbagai macam bentuk masalah, terutama masalah kekerasan fisik yang terjadi pada anak yang menyebabkan trauma. Untuk itu diperlukan tahap perencanaan untuk tahap pengenalan, antara kedua belah pihak yaitu konselor dan klien melakukan percakapan sederhana yang dapat mencairkan suasana, dan konselor agar dapat memancing klien untuk bercerita apa yang terjadi pada dirinya. Dan hal ini yang disebut dengan mengidentifikasi masalah klien secara lengkap beserta masalah dan kondisi awal dirinya. Perencanaan ini bersifat terbuka dan komprehensif. Pada tahap ini terlebih, juga secara komprehensif memuat materi dasar dan pengembangannya dalam hubungan dengan pihak-pihak terkait. Rencana layanan ini juga membuka keyakinan dan kejelasan klien akan diselenggarakannya berbagai “sub-layanan”, serta memeriksa kesehatan klien.⁶¹

Setelah tahap perencanaan dilaksanakan maka akan ditetapkan tujuan layanan advokasi, seperti Mengidentifikasi permasalahan klien, Mengetahui lebih jelas permasalahan kedua belah pihak klien, Memeriksa kesehatan klien secara fisik dan psikologis. Layanan advokasi tergantung pada keterbukaan klien dalam menyampaikan permasalahannya dan kejujuran mengungkapkan kondisi pribadinya. Namun keterbukaan klien ditentukan oleh faktor seorang konselor yang mampu menyakinkan klien sehingga klien percaya untuk mengadukan semua yang dialaminya, dan konselor harus mampu memberikan empati terhadap klien. Dengan demikian maka proses layanan advokasi dapat berjalan dengan lancar

⁶¹ Prayitno, *Seri panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung Program pendidikan Profesi Konselor*, (Padang: Program pendidikan Profesi Konselor Universitas Negeri Padang, 2012) Hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tercapai apa yang di harapkan. Melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan kesehatan psikologis klien.

Menurut analisa peneliti, konselor telah melaksanakan tahap perencanaan layanan advokasi dengan baik. Di mana konselor mampu melakukan identifikasi permasalahan dengan baik, konselor juga telah mampu melakukan tahap mencari kejelasan permasalahan klien, ditahap permulaan layanan advokasi konselor mampu membangun keakraban dengan klien, dan suatu percakapan yang ringan membutuhkan beberapa waktu untuk meredakan ketegangan untuk mempersiapkan melaksanakan proses layanan advokasi yang lebih serius lagi. Dan setelah diketahui secara jelas permasalahannya maka, dan akan diarahkan klien ketahap selanjutnya. Sekaligus pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis klien.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, ditemukan pelaksanaan proses perencanaan layanan advokasi secara bertahap yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan menciptakan suasana nyaman, dengan harapan yang hendak dicapai akan terlihat pada proses pelaksanaan layanana tersebut.

2. Pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan

Pada tahap pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan advokasi, maka terlebih dahulu mempersentasikan dengan tujuan memperkenalkan layanan advokasi pada klien sebelum layanan dilaksanakan. Selajutnya penetapan waktu dan tempat yang akan digunakan, agar besama-sama mematuhinya. Sekaligus menetapkan fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan layanan ini.

Pengorganisasian disesuaikan dengan keberhasilan layanan advokasi secara nyata yang diwujudkan dilapangan dan disesuaikan dengan seluruh unsur materi dan sarana dengan pihak terkait, waktu dan tempat, serta aspek terkait demi kelancaran proses pelaksanaan layanan.⁶²

⁶² Prayitno. *Panduan pelaksanaan bimbingan Konseling*,(Padang: Program pendidikan Profesi Konselor Universitas Negeri Padang, 2012). Hlm 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut analisa peneliti, dalam Pelaksanaan Layanan Advokasi konselor, adanya kerja sama dalam menjalankan proses layanan ini secara tahap-pertahap agar layanan berjalan lancar. Dan sebelum layanan advokasi dilaksanakan terlebih dahulu melaksanakan pengorganisasian unsur layanan dan menentukan sarana yang diperlukan dalam. Dan pengorganisasian unsur dan sarana layanan advokasi itu merupakan bentuk kegiatan yang mengatur pelaksanaan layanan. Dan terlebih dahulu mempersentasikan materi layanan kepada klien sebelum layanan dilaksanakan. Pengorganisasian bertujuan untuk memudahkan mendiagnosa klien agar layanan berjalan efektif sampai tahap akhir. Pengorganisasian disesuaikan dengan keberhasilan layanan advokasi secara nyata yang diwujudkan dilapangan yang disesuaikan dengan seluruh unsur materi dan sarana serta waktu dan tempat untuk melancarkan proses pelaksanaan layanan. Mempersiapkan fasilitas yang digunakan dalam layanan untuk mengoptimalkan tahap selanjutnya.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, telah menemukan bukti bahwa setelah tahap perencanaan berhasil maka lanjut ketahap pengorganisasian dan unsur-unsur layanan advokasi, dimana memperkenalkan apa sebenarnya layanan advokasi tersebut dan setelah klien dan pihak perkara memahami layanan advokasi yang akan dilaksanakan. Selajutnya penetapan waktu dan tempat, sarana serta fasilitas yang telah sesuai kesepakatan bersama. Dan pelaksanaan unsur pengorganisasian berjalan secara lancar sesuai tahap-pertahap.

3. Pelaksanaan layanan advokasi

Pada tahap Pelaksanaan layanan advokasi konselor akan berusaha semaksimal mungkin untuk melancarkan pelaksanaan layanan seperti penerimaan diri klien serta menggali lebih dalam permasalahan klien, berusaha untuk mencari informasi yang jelas dari permasalahan klien. Tahap penstrukturan merupakan tahap-tahap layanan yang harus disepakati bersama untuk kelancaran sidang keputusan kasus ini. Dan layanan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan keprofesionalan yang tegas dalam mengambil keputusan dari setiap permasalahan.

Layanan advokasi merupakan layanan dalam bimbingan dan konseling yang lebih kepada pembelaan terhadap hak klien yang tercederai oleh konselor untuk mendampingi klien ke pada proses tindak lanjut yang merupakan suatu bentuk bantuan yang bersifat mendampingi selama diperlukan, dan melepaskan diri jika permasalahan klien telah selesai.⁶³

Menurut analisa peneliti, dalam Pelaksanaan Layanan Advokasi merupakan kerjasama dalam melaksanakan layanan dengan terarah. Kesuksesan layanan advokasi membutuhkan perencanaan layanan yang tepat dan perorganisasian yang sesuai. Dan seorang yang profesional dalam mengambil keputusan dari setiap permasalahan. Diawali dengan tahap penerimaan, mengetahui permasalahan klien dan penstrukturan yang merupakan kesimpulan hasil keputusan layanan. Dengan tujuan agar menjalankan pelaksanaan layanan berdasarkan tahap-pertahap menuju keberhasilan layanan.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, telah menemukan bukti bahwa setelah tahap perencanaan berhasil maka lanjut ketahap pengorganisasian dan unsur-unsur layanan advokasi, dimana memperkenalkan apa sebenarnya layanan advokasi tersebut dan setelah klien dan pihak perkara memahami layanan advokasi yang akan dilaksanakan. Diawali dengan tahap penerimaan, mengetahui permasalahan klien dan tahap penstrukturan merupakan hasil keputusan layanan yang sesuai kesepakatan dalam mengikuti pelaksanaan layanan advokasi sidang.

4. Penilaian dan Analisis hasil evaluasi

Pelaksanaan tahap Penilaian dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya, penilaian analisis hasil evaluasi layanan advokasi merupakan penilaian pada seberapa besar keberhasilan layanan advokasi,

⁶³ Prayitno dan Tohirin, *Layanan-layanan dalam Bimbingan dan Konseling*, (Wikipedia 2011) hal, 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diamna klien akan diberikan pembelaan. Dari penilaian ini dapat mengukur seberapa jauh hak-hak klien yang ditangani melalui layanan advokasi dapat dikembalikan secara penuh kepada klien. Dan menafsirkan hasil evaluasi sebagai keputusan yang harus diterima kedua pihak. Dan disampaikan kepada kedua pihak secara transparan. Setelah itu akan disampaikan nasehat kepada pihak perkara untuk tidak berbuat tindak kekerasan apapun terhadap anak dan dapat kembali pada kehidupan yang damai.

Menurut analisa peneliti, dalam Pelaksanaan Layanan Advokasi merupakan kerjasama dalam melaksanakan layanan dengan terarah. Kesuksesan layanan advokasi membutuhkan perencanaan layanan yang tepat dan perorganisasian yang sesuai. Dan seorang yang profesional dalam mengambil keputusan dari setiap permasalahan. Penilaian hasil layanan advokasi terdapat pada keberhasilan pelaksanaan layanannya dan penilaian terukur dari seberapa besar hak-hak klien yang telah ditangani dapat dikembalikan lagi kepada klien. Dan menafsirkan hasil evaluasi sebagai keputusan yang harus diterima kedua pihak. Dan disampaikan kepada kedua pihak secara transparan. Setelah itu akan disampaikan nasehat kepada pihak perkara untuk tidak berbuat tindak kekerasan apapun terhadap anak dan dapat kembali pada kehidupan yang damai layaknya antara klien terhadap keluarga.

5. Tindak lanjut dan laporan

Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan hasil penilaian secara progresif pada setiap tahap layanan. Demikian pula laporan dapat dibuat berupa laporan pertahap kegiatan atau laporan lengkap pada akhir keseluruhan layanan dan disesuaikan dengan keperluan klien. Layanan advokasi tidak terlepas dari hasil penilaian secara progresif pada setiap tahap-tahap pelaksanaan layanan sebelumnya, pada tahap melaksanakan proses tindak lanjut kasus harus menyesuaikan dari hasil penilaian secara progresif. Dan memberikan nasehat kepada pihak pelaku untuk tidak lagi berbuat kesalahan yang sama dan saling memaafkan untuk kembali hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

damai dan sejahtera dalam sebuah keluarga, dan anak merupakan titipan allah swt yang patut untuk dilindungi, diberikan ilmu kasih sayang dari orang tuanya memberikan pemahaman bagi kedua pihak untuk kembali pada jalan yang di ridhoi Allah swt.

Menurut Prayitno, Layanan Advokasi merupakan bantuan berupa suatu dampingan untuk kasus yang terlapor ke lembaga berwajib dan sedang dalam penanganan lembaga tersebut. Dan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dengan proses konseling maka perlunya diadakan layanan advokasi untuk membantu menyelesaikan kasus ini.⁶⁴

Menurut analisa peneliti, dalam Pelaksanaan Layanan Advokasi membutuhkan perencanaan layanan, perorganisasian layanan dan pelaksanaan layanan yang tepat terarah agar keberhasilan layanan sampai tahap akhir. Untuk melaksanakan proses tindak lanjut kasus harus menyesuaikan dari hasil penilaian secara progresif. Dan memberikan nasehat kepada pihak pelaku untuk tidak lagi berbuat kesalahan yang sama dan saling memaafkan untuk kembali hidup damai dan sejahtera dalam sebuah keluarga, dan anak merupakan titipan allah swt yang patut dilindungi dengan kasih sayang orang tua, agar anak dapat kembali pada kehidupan yang layak sesuai dengan usianya.

⁶⁴ Prayitno, *Seri panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung [Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung]*, (Universitas Negeri Padang 2012). Hlm 274